

## POLITIK EKOLOGI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM PERSPEKTIF OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN BANJAR

Samahuddin Muharram<sup>1,\*</sup>, Fadly<sup>1</sup>, Dhena Aldhalia<sup>1</sup>, Rosa Pebriandini<sup>1</sup>, Falehah Nabila<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Lambung Mangkurat, JL B Hasan Basri, Banjarmasin, Indonesia

\*Penulis korespondensi: [fadly@ulm.ac.id](mailto:fadly@ulm.ac.id)

**Abstrak.** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kebijakan politik ekologi dengan pengelolaan lingkungan hidup terhadap kondisi sosial, dan ekonomi masyarakat dalam perspektif otonomi daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam studi ini adalah observasi (pengamatan), wawancara mendalam dan studi pustaka. Hasil penelitian di 3 desa sampel penelitian yakni Desa Pembatanan, Kecamatan Sungai Tabuk, Desa Manarap Baru, Kecamatan Kertak Hanyar dan Desa Pasar Kamis, Kecamatan Kertak Hanyar membuktikan bahwa perubahan ekologi yang terjadi bukan dikarenakan rasionalitas masyarakat dan perusahaan (industri) saja, melainkan ada intervensi politik-ekonomi pemerintah melalui kebijakannya. Asumsi pokok dalam kondisi tersebut bahwa perubahan lingkungan tidaklah bersifat netral. Melainkan merupakan suatu bentuk *politicized environment* yang melibatkan banyak aktor berkepentingan. Kondisi ini menekankan bahwa persoalan lingkungan bukan disebabkan karena persoalan internal dalam lingkungan tersebut (masyarakat), tetapi lebih disebabkan karena pengaruh eksternal yaitu karena tekanan politik dan ekonomi di luar dirinya, termasuk juga dengan adanya kebijakan otonomi daerah (desentralisasi). Desentralisasi dan otonomi daerah adalah tantangan lain untuk tata kelola sumber daya alam. Ada kepentingan yang bersaing antara pemerintah pusat dan daerah karena perbedaan interpretasi atas regulasi desentralisasi. Meskipun menguntungkan bagi pembangunan ekonomi, pengelolaan lingkungan yang tidak berkelanjutan juga mengancam mata pencaharian lokal dan keanekaragaman hayati yang kaya. Sehingga perlu melibatkan pemangku kepentingan dari semua tingkatan yakni pemerintah pusat, pemerintah kabupaten, sektor swasta, lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan, masyarakat lokal.

**Kata kunci:** politik ekologi, pengelolaan lingkungan hidup, otonomi daerah, desentralisasi, kebijakan.

### 1. PENDAHULUAN

Ketidaksetaraan relasi kuasa dalam pengelolaan lingkungan hidup secara umum, bisa dilacak dari sejarah panjang pembukaan hutan dan lahan, termasuk hutan rawa gambut, untuk kepentingan pembangunan ekonomi. Meningkatnya kejadian Kebakaran Hutan dan Lahan (KARHUTLA) dan pengelolaan lingkungan yang destruktif terjadi karena proses pembukaan hutan dalam skala luas, yang didorong oleh motif ekonomi perusahaan untuk membuka lahan dengan cara membakar, serta faktor-faktor yang berkaitan dengan kebijakan pembangunan yang eksploitatif terhadap sumber daya alam. Pendekatan politik ekologi ini yang dipakai berdasarkan perspektif otonomi daerah dalam melihat pengelolaan lingkungan hidup adalah salah satu cara pandang dalam memahami persoalan hubungan manusia dengan lingkungan, merupakan pemikiran yang baru berkembang pasca pemberlakuan kebijakan otonomi daerah (Otero & Nielsen, 2017)

Cara pandang baru dalam memahami persoalan lingkungan ini banyak dipengaruhi dari pemikiran neo-marxian tentang *underdevelopment*, sebagai bentuk kritik dari pendekatan *malthusian* dan *cultural ecology* (pendekatan sistemik) selama ini. Oleh sebab itu, cara pandang politik ekologi ini lebih menekankan analisisnya bahwa persoalan lingkungan bukan disebabkan karena persoalan internal dalam lingkungan tersebut, tetapi lebih disebabkan karena pengaruh eksternal yaitu karena tekanan politik dan ekonomi di luar dirinya, termasuk juga dengan adanya kebijakan otonomi daerah (desentralisasi). Pengelolaan lingkungan tentu memiliki dimensi dan implikasi politik, dimana aktor-aktor seperti pemerintah dan perusahaan memiliki kuasa dan kapital untuk menentukan pola dan arah pemanfaatan sumber daya alam, sementara warga masyarakat merupakan pihak yang paling lemah dan menjadi korban dari dampak-dampak yang ditimbulkan. Pengelolaan lingkungan hidup menjadi ajang kontestasi kepentingan politik dari peran, pengaruh dan kepentingan dari aktor-aktor yang terlibat didalamnya (Arifin, 2012; Srinivasan & Kasturirangan, 2016).

Berangkat dari pemikiran ini, maka menurut pandangan politik ekologi, konsekuensi pengelolaan lingkungan hidup termasuk hubungan manusia dengan alam (merusak maupun lestari) lebih dipengaruhi oleh adanya tekanan politik dan ekonomi akibat pengaturan kebijakan otonomi daerah. Ini berbeda dengan pandangan kaum ekologi sebelumnya yang lebih memandang relasi manusia dengan alam lebih disebabkan

karena tekanan internal dalam hubungan itu sendiri, seperti tekanan penduduk (*malthusian*), dan persoalan teknis dalam pengelolaan (eksploitasi dan konservasi) (Arifin, 2012; Ostrom & Schlager, 2003).

Persoalan pola hubungan manusia dengan lingkungan, bukanlah persoalan kepadatan penduduk, atau karena persoalan sistemik (*cultural ecology*), tetapi sebenarnya lebih disebabkan karena persoalan ketidakmerataan (*inequality*) dan faktor tekanan kekuasaan (*power and authority*). Oleh sebab itu, politik ekologi lebih mengarahkan cara pandangnya bahwa persoalan kerusakan lingkungan tidak murni disebabkan karena persoalan internal, tetapi dominan disebabkan karena faktor eksternal yang sifatnya global (makro) (Satria, 2007; Satira, 2009). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis politik ekologi terkait pengelolaan lingkungan hidup masyarakat Kabupaten Banjar. Secara lebih spesifik, riset ini ditujukan untuk memberi wawasan tentang salah satu pemikiran baru dalam memahami persoalan lingkungan yang sedang kita hadapi, yaitu melalui cara pandang yang dikenal dengan politik ekologi dan relevansinya dengan relasi kuasa.

## 2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Obie *et al*, 2014). Penelitian awal dilakukan dengan metode *desk study* dengan teknik dokumentasi dari berbagai sumber kepustakaan. Analisis data hasil penelitian dalam kajian ini dilakukan dengan bersumber pada data, fakta dan narasumber kunci.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Hasil Penelitian di Desa Pembantan, Kecamatan Sungai Lulut.

Kehidupan masyarakat desa Pembantan dapat terlihat jelas bahwa mayoritas bekerja sebagai buruh tani atau buruh perkebunan lainnya serta peternakan. Hal ini dapat terlihat dari masing-masing pekarangan rumah pada saat tersebut dipenuhi dengan padi yang sudah dipanen dan sedang dijemur di bawah terik matahari. Adapun masyarakat yang memanfaatkan lahan kosong disamping rumah untuk menanam padi. Beberapa masyarakat yang lain juga memanfaatkan lahan pekarangan mereka untuk ditanam waluh (labu), terong, kacang, umbi-umbian (ubi jalar), jagung dan tebu. Selain itu masyarakat desa Pembantan juga akrab dengan sungai. Hal ini terlihat selama melaksanakan observasi lapangan, banyak warga yang berlalu-lalang menggunakan jukung di sungai serta beberapa rumah warga juga terdapat jukung yang sedang tidak dipergunakan.

Menurut bapak Bahtiar, selaku narasumber dan masyarakat di desa Pembantan, desa tersebut untuk pengelolaan lingkungan hidup khususnya untuk pengelolaan lahan tani masih tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah, hal ini beliau sampaikan karena bantuan subsidi dari pemerintah untuk buruh tani masih sangat minim, hanya diberikan 1 karung kecil pupuk dan obat tanah, selebihnya buruh tani harus bermodal sendiri. Kemudian narasumber juga bercerita mengenai keluasan wilayah yang diatur oleh desa Pembantan, menurut beliau karena luas daerah desa Pembantan ini membuat jalan untuk perbaikan dan pengelolaan jalan dan sarana dan prasarana lainnya terhambat. Karena masing-masing warga ingin mendapatkan perbaikan segera dalam hal jalanan dan lainnya sedangkan RT yang termasuk ke dalam wilayah desa Pembantan termasuk 12 RT. Menurut beliau hal inilah yang menghambat untuk mendapatkan dana perbaikan desa sebab aparat desa pun bingung wilayah yang mana yang harus mendapatkan perhatian terlebih dahulu dan tetap menimbulkan nilai keadilan.

Sulitnya akses jalan tersebut akhirnya, membuat akses masyarakat terhadap ekonomi dan pekerjaan menjadi terhambat. Padahal Desa Pembantan merupakan wilayah dan daerah potensial yang memiliki lahan pertanian dan lahan perkebunan yang berkembang. Dalam hal ini dapat terlihat dari mayoritas pekerjaan masyarakat desa Pembantan di mana mereka rata-rata bekerja sebagai buruh tani, hal ini terlihat pada hampir keseluruhan rumah warga di saat ini yang merupakan musim katam atau musim panen padi sedang menjemur hasil panen padi mereka masing-masing. Kehidupan masyarakat desa Pembantan juga tidak terlepas dari aspek pengelolaan lingkungan hidup berupa perkebunan, di mana masyarakat selain bertani juga berkebun umbi-umbian seperti keladi, dan ubi jalar. Selain itu masyarakat juga menanam kacang, labu, terong, jagung maupun tebu di sisa lahan di sekitar rumah mereka. Lingkungan hidup adalah keseluruhan daya, keadaan serta makhluk hidup yang mana manusia terdapat didalamnya beserta tingkah perilakunya. Artinya lingkungan hidup merupakan keadaan dari lingkungan termasuk tumbuhan, hewan dan makhluk hidup lainnya termasuk manusia yang saling berkaitan.

Menanam padi juga masyarakat lakukan dengan memanfaatkan lahan sisa di sekitar rumah, hal ini kemungkinan besar karena masyarakat tidak memiliki modal untuk membayar sewa pinjam lahan untuk bertani atau memang tidak ada orang yang meminta jasa mereka untuk merawat lahan pertanian orang tersebut. Sehingga sebaik mungkin mereka memanfaatkan lahan sisa di sekitar rumah agar tetap bisa bertani sebagai jalan penghidupan. Selain itu juga ada masyarakat yang memanfaatkan kepiawaian mereka dalam membuat atap rumah menggunakan daun rumbia, sehingga ada beberapa warga menekuni pekerjaan membuat atap rumah dari daun rumbia (memanfaatkan kehidupan yang ada di sekitar). Selain itu, masyarakat lain juga memanfaatkan lahan sisa mereka untuk menanam umbi seperti keladi, jagung, terong, kacang panjang sebagai tanaman yang mudah dirawat serta memiliki nilai jual yang cukup tinggi di pasar sebagai pengalihan penghidupan lainnya.

Selain pengelolaan lingkungan hidup masyarakat desa Pembantanan di wilayah daratan, kehidupan lainnya juga terdapat di wilayah perairan/lahan basah. Desa Pembantanan terletak berdampingan dengan sungai yang besar, sehingga saat ini sanitasi lingkungan masyarakat desa masih sangat akrab dengan sungai hal ini ditunjukkan dengan banyaknya rumah apung dan batang (tempat yang dipergunakan masyarakat untuk melakukan aktivitas) seperti mencuci, mandi dan lainnya. Selain itu pula, kehidupan di wilayah perairan juga dapat terlihat bahwasanya hampir masing-masing masyarakat memiliki jukung (sampan) atau kapal kecil di sekitar rumah mereka atau mahir dalam mengendalikan jukung tanpa mesin. Hal ini dikarenakan masih banyak masyarakat memanfaatkan sungai untuk melakukan perjalanan atau sebagai salah satu akses mobilitas masyarakat masih menggunakan jukung serta selain hal itu juga, sebagian masyarakat desa pergi memancing maupun mencari ikan lainnya ke tengah sungai menggunakan jukung.

Lingkungan hidup perairan di desa Pembantanan juga masih asri di mana di sekitaran sisir sungai masih banyak terdapat pohon rumbia yang mana daun pohon rumbia masih banyak dipergunakan masyarakat sebagai atap rumah kayu mereka. Memanfaatkan sungai, dan lahan rawa, banyak masyarakat juga berprofesi sebagai peternak bebek maupun ayam. Selain menjadi buruh tani, sebagian masyarakat juga memilih untuk beternak ayam kampung serta beternak bebek untuk memanfaatkan lahan lingkungan yang ada.

Melihat pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan di desa Pembantanan dapat dikatakan jauh dari kata baik, sebab melihat sanitasi lingkungan masyarakat yang masih belum mumpuni, yaitu tidak adanya tempat pembuangan sampah terpadu dan kebiasaan masyarakat yang membuang sampah ke sungai. Kemudian untuk tempat mandi, membuang hajat dan mencuci masih di sungai di mana diketahui jaringan air bersih di desa tersebut masih terbatas. Selain itu untuk pengelolaan jembatan-jembatan kecil yang menyatukan akses jalan desa Pembantanan masih jauh dari kata layak, sekitar 3 dari 5 jembatan yang ada tidak mendapatkan perhatian, jembatan masih dari bahan kayu yang sudah lapuk dan harus berhati-hati ketika melewatinya agar tidak terjerebab akibat kayu yang sudah lapuk. Kemudian pengelolaan jalan sebagai akses satu-satunya mobilitas masyarakat memerlukan perhatian yang serius sebab jalanan yang kecil dengan kondisi yang hanya dihampar batu-batu tidak rata membuat jalan bergelombang dan cenderung berlubang membuat perjalanan menjadi banyak terjal dan membuat masyarakat sulit mengakses jalan tersebut.

Berdasarkan penelitian yang berlangsung dengan Bapak Bahtiar yang berusia kurang lebih 53 tahun mengenai lingkungan hidup, beliau menjawab tidak jauh dari pengelolaan lingkungan di kawasan lahan pertanian. Hal ini dimaklumi karena bertani dan berkebun merupakan pekerjaan yang beliau tekuni dari dulu hingga sekarang. Dari hasil wawancara singkat dengan bapak Bahtiar, peneliti menemukan bahwa pengelolaan lingkungan hidup di desa Pembantanan harus mendapatkan perhatian lagi oleh pemerintah, sebab sebagai wilayah yang luas dan rata-rata lahan digunakan untuk bercocok tani, berkebun sayur-mayur dan dimanfaatkan untuk peternakan, pemerintah harus lebih memperhatikan bagaimana pengelolaan padi desa Pembantanan masih sangat tradisional tidak tersentuh modernisasi dan kemajuan teknologi terkini. Selain itu kendala lain dalam pengelolaan lahan pertanian juga dipermasalahkan bagi buruh tani yang memiliki modal sedikit, akan tetapi dari pemerintah tidak memberikan bantuan subsidi pupuk dan obat tanah yang sangat diperlukan sesuai dengan kebutuhan buruh tani.

Pengelolaan lingkungan hidup lain yang menarik perhatian peneliti dari hasil wawancara dengan bapak Bahtiar adalah peristiwa alam bencana banjir yang beberapa waktu lalu sempat melanda wilayah Kalimantan Selatan, termasuk desa Pembantanan. Sebagaimana diketahui bahwasanya desa Pembantanan termasuk wilayah hulu yang mana seharusnya ketika mengalami kenaikan volume air, tingkat penurunan air akan sangat cepat karena air dari hulu akan mengalir dengan cepat, akan tetapi pada kenyataannya, penurunan volume air di desa Pembantanan sangat lama, memerlukan waktu kurang lebih 2 bulan untuk menurunkan banjir yang setinggi hampir atap rumah.

Akibat dari peristiwa tersebut, semua lahan pertanian dan perkebunan masyarakat rusak total, hama keong

semakin banyak dan lahan rusak total beserta dengan anak padi dan padi yang sudah setenengah garapan buruh tani hal ini membuat para buruh tani mengalami rugi besar, akan tetapi tidak ada kebijakan dan bantuan dari pemerintahan yang hadir di tengah krisis tersebut. Sebagai buruh tani dengan modal yang pas-pas-an, pak Bahtiar dan sebagian tetangganya yang lain tidak dapat menanam ulang dengan membeli benih baru padi. Selain itu, pak Bahtiar juga mengeluhkan pengelolaan jalan yang sedari dulu tidak mendapatkan perhatian untuk diperbaiki, padahal jalan menjadi akses penting untuk membuat mobilitas masyarakat desa lebih lancar serta permasalahan air bersih dari PDAM yang masih belum sampai ke desa mereka.

Ketersediaan air bersih di desa Pembantan yakni dengan menggunakan dan memanfaatkan dari Pamsimas (Program Nasional Penyediaan Air Minum dan Sanitasi berbasis Masyarakat). Sementara sanitasi lingkungan di Desa Pembantan masih buruk, hal ini terlihat tidak adanya tempat pembuangan sampah terpadu, pengumpulan sampah di masing-masing rumah, kebanyakan sampah dibuang ke sungai. Banyak masyarakat masih memanfaatkan sungai untuk tempat sanitasi yang artinya masih banyak terdapat rumah-rumah apung di pinggiran sungai yang dimanfaatkan warga.

### **3.2 Hasil Penelitian di Desa Manarap Baru**

Lingkungan hidup merupakan semua daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk di dalamnya manusia beserta perilakunya. Di desa Manarap Baru, lingkungan hidup yang terdapat berupa lahan sawah (pertanian) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat sebagai buruh tani. Lingkungan hidup desa Manarap Baru merupakan kehidupan yang ada di kawasan tanah rawa. Tanah rawa memang cocok untuk dipergunakan sebagai lahan sawah. Desa Manarap Baru bertetangga dengan desa Manarap Tengah. Memasuki wilayah Desa Manarap Baru, pemandangan hamparan lahan sawah merupakan pengembangan lahan pertanian yang sangat massif. Pada saat melakukan observasi lapangan kebetulan memasuki musim panen padi sehingga menampilkan hamparan padi yang sudah menguning. Pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan oleh masyarakat sebagaimana yang kami dapatkan dari Bapak Thamrin selaku Kepala Desa, terkait pengelolaan sungai bukan tanggung jawab dari Desa Manarap Baru akan tetapi tanggung jawab dari wilayah Gambut. Sedangkan beberapa jalan seperti di Handil Jambu merupakan tanggung jawab dari Desa Manarap Baru. Sehingga dalam pengelolaan sungai masyarakat Desa Manarap Baru tidak bertanggung jawab akan hal tersebut. Pada saat ini, Bapak Thamrin merupakan Kades yang baru dilantik oleh Bupati dan sebagaimana dari penuturan beliau pada bulan Januari hingga bulan Juni, dari PJ tidak ada memberikan perintah dan hal lainnya dalam pelaksanaan mengenai pengurusan desa serta di saat beliau melakukan pelaporan jalan yang tidak layak jalan dan meminta perbaikan, sampai sekarang dari Bupati masih belum memberikan respon dan hal ini menurut beliau mungkin dilatarbelakangi banyaknya dana yang digunakan dalam penanganan pandemi Covid-19.

Bapak Markaramah merupakan salah seorang warga desa Manarap Baru yang tinggal sangat lama dari tahun 1972, dari situasi desa yang masih hutan rawa hingga saat ini sudah banyak sekali pemanfaatan tanah rawa sebagai lahan pertanian hingga perumahan yang pada desa Manarap Baru sangat banyak. Dari penuturan beliau bahwasanya, untuk pengelolaan jalan sedari dulu masih kurang mendapat perhatian dari pihak pemerintah, kemudian untuk pengelolaan lahan sawah pada saat ini banyak buruh tani bertumpu pada pemberian pupuk bersubsidi, akan tetapi pupuk subsidi masih jarang yang berakhir membuat masyarakat harus membeli pupuk sendiri dengan harga yang cukup tinggi.

### **3.3 Hasil Penelitian Desa Pasar Kamis**

Pertanian Pangan merupakan jenis tanaman yang banyak dikembangkan di desa Pasar Kamis. Luas lahan Padi seluruhnya dengan total 479 Ha. Pola pengelolaan pertanian dikelola secara modern dengan menggunakan alat dan mesin dari pemerintah seperti traktor dan mesin penggilingan padi, serta menggunakan obat-obatan pertanian. Perkembangan produksi hasil panen sebesar 4,475 (Ton/Ha) dengan nilai produksi sebesar Rp 10.059.000.000. Potensi pertanian ini tentu sangat mampu menunjang pendapatan masyarakat desa karena merupakan wilayah penghasil beras terbanyak karena area lahan pertanian yang cukup luas dan baik karakteristiknya. Untuk permasalahan pertanian hanya sebagian besar area lahan pertanian yang kurang baik sehingga menimbulkan produktivitas padi yang kurang baik pula. Dalam sektor peternakan pun, jenis dan jumlah ternak ayam kampung sebanyak 2.500 ekor dan Bebek sebanyak 1.500 ekor. Pola pengelolaan dilakukan secara tradisional oleh masing-masing masyarakat yang memiliki usaha peternakan, dan tidak secara khusus dilakukan pengelolaannya karena merupakan usaha sampingan dan memanfaatkan lahan pekarangan di sekitar rumah warga saja. Perkembangan produksi pun masih terlihat tradisional dengan memanfaatkan kandang buatan

pribadi dan jaring pembatas seadanya. Peternakan ayam dan bebek menjadi potensi usaha yang besar bagi masyarakat desa Pasar Kamis, namun masalahnya adalah masih banyak juga warga yang belum mendaftarkan usahanya tersebut kepada perangkat desa sehingga perlu mengurus lebih lanjut lagi untuk dikembangkan.

### 3.4 Politik Ekologi Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Otonomi Daerah Di Kabupaten Banjar

Lingkungan lahan basah adalah entitas penting dalam menopang kehidupan, karena lingkungan gambut dan air merupakan bagian dari ekosistem global yang saling terkait (Thapa *et al.*, 2018). Penting untuk memahami bagaimana berbagai ekosistem terkait satu sama lain, termasuk ketergantungan populasi manusia yang tinggal di suatu daerah dengan ketersediaan dan kualitas sumber daya air. Keterkaitan antara gambut dan air terlihat jelas fungsi alami sungai, termasuk sebagai pencegah bencana (Calder *et al.* 2007). Gambut berperan penting dalam siklus hidrologi, berkontribusi dalam pengurangan risiko bencana dan menyediakan berbagai layanan ekosistem termasuk penyediaan kayu bakar, kayu dll, pengaturan kualitas air dan aliran, penyerapan karbon, pengurangan erosi dan sumber daya penting bagi flora dan fauna. Sementara air menghidrasi hutan, satwa liar, dan manusia serta mendukung dalam menumbuhkan makanan dan penopang bagi industri. Dengan demikian, hilangnya hutan gambut dan air merupakan ancaman langsung terhadap konservasi keanekaragaman hayati, dan mempengaruhi mata pencaharian masyarakat lokal (Thapa *et al.*, 2018).

Banyak penelitian yang mengaitkan dampak pengelolaan sumber daya alam dengan mata pencaharian masyarakat. Namun, sangat sedikit penelitian yang melihat keterkaitannya antara sumber daya alam, layanan kolektif mereka dalam meningkatkan penghidupan masyarakat, dan pengaruhnya terhadap keadaan sumber daya alam (Thapa *et al.*, 2018). Upaya untuk menyelaraskan pembangunan ekonomi dengan pelestarian lingkungan lahan basah, secara khusus di Kabupaten Banjar berjalan secara dinamis dan kompleks. Kabupaten seluas 4.688,00 km<sup>2</sup> ini sebagian besar wilayahnya merupakan lingkungan lahan basah. Pemerintah, pihak Swasta, LSM dan organisasi konservasi telah mengupayakan pembangunan yang berkelanjutan dan melestarikan keanekaragaman hayati yang kaya di daerah tersebut. Tiga pendekatan berbeda untuk konservasi telah dicoba. Perencanaan tata ruang pertama untuk pengaturan penetapan lahan yang spesifik dan penetapan kawasan lindung termasuk didalamnya penetapan zona warna (misal hijau untuk lahan pertanian). Kedua, langkah-langkah telah diambil untuk mengurangi dampak lingkungan secara negatif dari pembalakan industri dan promosi pelestarian keanekaragaman hayati. Terakhir, manajemen yang terdesentralisasi dan berbasis masyarakat telah diupayakan dengan asumsi bahwa ini akan menghasilkan hasil lingkungan dan sosial yang lebih baik daripada pembangunan industri skala besar (Pemerintah Kabupaten Banjar, 2013).

Langkah-langkah konservasi ini telah dilakukan selama beberapa periode namun hasilnya masih belum maksimal. Penerapan pembangunan yang menghasilkan kepentingan ekonomi lebih mendominasi daripada kepentingan ekologi. Masa depan yang berkelanjutan untuk kabupaten Banjar terletak pada menemukan keseimbangan yang tepat antara kawasan lingkungan lahan basah yang dikelola pada skala industri dan masyarakat, dan konversi lahan. Secara internasional dan nasional telah banyak retorika tentang keseimbangan antara pembangunan, tujuan konservasi dengan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan mata pencaharian lokal. Beberapa rencana dan program nasional sejak tahun 1980-an telah mengupayakan kondisi ini (Departemen Kehutanan, 1985).

Masyarakat internasional juga telah mendukung pemerintah Indonesia dalam upaya mewujudkan pengelolaan lingkungan yang lebih lestari. Langkah-langkah untuk mempromosikan perencanaan tata ruang yang sebagian besar dilakukan oleh pemerintah pusat tetapi juga harus didukung oleh organisasi konservasi lokal dan masyarakat yang berusaha untuk mengidentifikasi kawasan lingkungan lahan basah yang bernilai tinggi untuk keanekaragaman hayati. Upaya ini akhirnya mengakibatkan kebijakan otonomi daerah atau desentralisasi kewenangan atas alam sumber daya yang diserahkan ke tingkat kabupaten dan masyarakat juga telah didorong untuk berpartisipasi secara aktif. Desentralisasi dipromosikan karena manajerial sumber daya lokal akan memiliki kepentingan langsung dalam memastikan bahwa pembangunan akan tidak menurunkan basis sumber daya dan itu akan menguntungkan bagi distribusi manfaat secara lebih adil (Colfer *et al.* 1997).

Pemerintah provinsi Kalimantan Selatan telah menunjukkan banyak komitmen dan membuat kemajuan yang signifikan dalam meningkatkan kerangka peraturan dalam beberapa tahun terakhir. Ini termasuk kebijakan gubernur Kalsel terkait Revolusi Hijau dan peraturan daerah yang mengakui hak atas tanah adat. Termasuk juga Perda Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan. Namun, bagaimanapun, mekanisme sektor publik tidak mampu bekerja secara memadai untuk mengatasi masalah yang terjadi di lapangan. Khususnya terdapat kelemahan dalam implementasi di

tingkat kabupaten. Dimana masyarakat di beberapa desa penelitian yakni desa Pembantanan, Desa Manarap Baru dan Desa Pasar Kais tidak mendapatkan realisasi yang layak dari program-program lingkungan hidup dari pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten. Bahwa ini terutama karena pihak berwenang tidak menerapkan peraturan dan kebijakan yang ada dengan baik, termasuk terkait permasalahan pengelolaan DAS terpadu, izin tanah, perencanaan tata ruang, dan penilaian dampak lingkungan (AMDAL). Kegagalan regulasi ini telah berkontribusi pada ekspansi yang cepat pada sektor pertambangan di Kalimantan Selatan dan Kabupaten Banjar salah satunya. Konflik politik adalah alasan yang mendasari mengapa peraturan publik diimplementasikan dengan buruk. Pemerintah pusat dan daerah berada dalam perebutan manfaat dari sumber daya alam dan alih fungsi lahan. Kurangnya perencanaan tata ruang, peta lahan yang saling bertentangan dan perizinan yang seringkali diskriminatif dan menguntungkan para pemilik modal. Disatu sisi, kondisi ini memang dilematis, sedangkan pajak pendapatan yang diperoleh dari produksi dan penjualan sumber daya alam (dari pertambangan, kelapa sawit, karet, buah, dll) harus dikembalikan ke pemerintah pusat. Salah satu penyebab struktural dari implementasi yang lemah ini adalah bahwa otoritas pemerintah kabupaten menjadi semakin tidak bertanggung jawab terhadap hak-hak masyarakat.

Masalah lingkungan dan sosial, tidak cukup hanya dengan hubungan antar kebijakan saja, namun juga terdapat faktor biofisik yang penting secara regional, keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam lokal sekaligus juga persoalan mata pencaharian masyarakat lokal. Pemahaman tentang hubungan lingkungan (ekologi) dengan pembangunan (ekonomi) sangat relevan diperhatikan dalam pembuatan kebijakan yang memungkinkan pembangunan terus berjalan dan sumber daya alam dan ekologi lingkungan tetap diperhatikan. Mendamaikan dua kutub yakni ekologi dan ekonomi tentu membutuhkan manajemen yang solutif dan partisipasi masyarakat yang tepat (Frost *et al*, 2006; Zuidema & Sayer, 2003). Partisipasi masyarakat lokal dengan pemangku kepentingan dalam perencanaan dan pengelolaan telah lama dianjurkan sebagai suatu keharusan langkah untuk mencapai keberlanjutan dalam pembangunan (Bourgeois & Pfund, 2008; Sandker *et al*, 2007).

Kebijakan desentralisasi (otonomi daerah) yang dilaksanakan pada tahun 1999, mengakibatkan banyak alokasi penggunaan lahan telah menjadi kendali pemerintah kabupaten, meskipun beberapa alokasi wilayah kehutanan secara hukum berada di bawah pemerintah pusat (Sandker *et al*, 2007). Dengan desentralisasi, banyak pejabat daerah di Kalimantan memperoleh kontrol yang lebih besar atas sumber daya alam, yang seringkali justru jauh melampaui otoritas hukumnya (Obidzinski & Barr, 2003). Desentralisasi tidak hanya menghasilkan pemerintah kabupaten yang mengamankan bagian yang lebih besar dari pendapatan daerah dari sektor sumber daya alam, tetapi juga memiliki implikasi untuk masyarakat lokal (Engel *et al*, 2006).

#### 4. SIMPULAN

Desentralisasi dan otonomi daerah adalah tantangan lain untuk tata kelola sumber daya alam. Ada kepentingan yang bersaing antara pemerintah pusat dan daerah karena perbedaan interpretasi atas regulasi desentralisasi. Meskipun menguntungkan bagi pembangunan ekonomi, pengelolaan lingkungan yang tidak berkelanjutan juga mengancam mata pencaharian lokal dan keanekaragaman hayati yang kaya. Sehingga perlu melibatkan pemangku kepentingan dari semua tingkatan yakni pemerintah pusat, pemerintah kabupaten, sektor swasta, lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan, masyarakat lokal. Memahami tata kelola sumber daya di wilayah lingkungan lahan basah adalah penting, karena tidak hanya memperkuat kesadaran konservasi itu sendiri tetapi juga memberikan gambaran yang lebih baik tentang kompleksitas yang ada di lapangan.

#### 5. UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu terealisasinya penelitian ini, antara lain kepada Universitas Lambung Mangkurat sebagai penyandang dana penelitian melalui Kontrak Penelitian Nomor 009.28/UN8.2/PL/2021. Ucapan terima kasih juga diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Banjar, dan Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa Pembantanan, Kecamatan Sungai Tabuk, Desa Manarap Baru, Kecamatan Kertak Hanyar dan Desa Pasar Kamis, Kecamatan Kertak Hanyar

#### 6. DAFTAR PUSTAKA

Arifin, Z. (2012). Politik Ekologi: Ramah Lingkungan Sebagai Pembeneran. *Jurnal Ilmu Sosial Mamangan*. Edisi 1, Tahun I.  
Colfer, C., N. Peluso, dan SC Chin. (1997). Melampaui tebas dan bakar: membangun adat pengelolaan hutan hujan tropis Kalimantan.



New York.

- Engel, S., R. Lopez, and C. Palmer. (2006). Community-industry contracting over natural resource use in a context of weak property rights: the case of Indonesia. *Environmental and Resource Economics* 33(1):73–93.
- Frost, P., B. Campbell, G. Medina, and L. Usongo. (2006). Landscape-scale approaches for integrated natural resource management in tropical forest landscapes. *Ecology and Society* 11(2): 30.
- Obie, M., et al. (2014). Konflik Etnis Di Pesisir Teluk Tomini: Tinjauan Sosio-Ekologi Politik. *Al-Tahrir*, Vol. 14, No. 2, 321-342.
- Ostrom, E & Schlager, E. (2003). The Formation of Property Rights”. Dalam (eds.) Susan S. Hanna, Carl Folke, Karl-Goran Maler. *Rights to Nature: Ecological, Economic, Cultural, and Political Principles of Institutions for the Environment*. 156 2 (June, 2003), 153-181.
- Otero, I. & Nielsen J.O. (2017). Coexisting With Wildfire? Achievements And Challenges For a Radical Social-Ecological Transformation In Catalonia (Spain). *Geoforum* 85:234–246.
- Sandker, M., A. Suwamo, and B. M. Campbell. (2007). Will forests remain in the face of oil palm expansion? Simulating change in Malinau, Indonesia. *Ecology and Society* 12 (2): 37.
- Satria A. (2007). Ekologi Politik dalam Ekologi Manusia. Fakultas Ekologi Manusia IPB, Bogor
- Satria, A. (2009). *Ekologi Politik Nelayan*. Yogyakarta: LKiS.
- Srinivasan, K. & Kasturirangan, R. (2016). Political Ecology, Development, And Human Exceptionalism. *Geoforum*. 75:125-128.
- Thapa, K., et al. (2018). Linkages among forest, water, and wildlife: a case study from Kalapani community forest in the Lamahi bottleneck area of Terai Arc Landscape. *International Journal of the Commons*, Vol. 12, No. 2 (2018), pp. 1-20
- Zuidema, P. A., and J. A. Sayer. (2003). Tropical forests in multi-functional landscapes: the need for new approaches to conservation and research. Pages 9-19 in P. A. Zuidema, editor. *Tropical forests in multi-functional landscapes*. Prince Bernhard Centre for International Nature Conservation, Utrecht University, Utrecht, The Netherlands.